

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberi pernyataan bahwa diberikan hak otonomi kepada Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pemerintahannya secara mandiri. Dalam situasi tersebut, untuk mengelola dan memanfaatkan dana sesuai prioritas serta merta kebutuhan masyarakat di wilayahnya maka pemerintah daerah diberi hak otoritas. Adanya kemandirian dalam mengelola menjadi alasan utama adanya pelaksanaan otonomi daerah. Sistem kelola dan pengawasan keuangan daerah menjadi salah satu dampak langsung yang dapat dirasakan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Salah satu aspek krusial dalam proses pengelolaan tersebut adalah perencanaan anggaran dalam hal pengeluaran belanja modal.

Belanja modal merupakan jenis pengeluaran daerah yang penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur yang berperan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Waryanto, 2017). Meningkatnya layanan publik dan masyarakat yang sejahtera melalui belanja modal menjadi sarana untuk mencukupi target kemandirian daerah secara menyeluruh. Dengan

demikian, belanja modal memiliki peran signifikan dalam menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan daerah yang didapat, semakin besarlah potensi investasi dalam bentuk pengeluaran biaya modal untuk pengembangan wilayah.

Aset tetap daerah bisa didapatkan dari belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembelian-pembelian aset tersebut untuk pengadaan sarana publik secara maksimal bagi masyarakat umum (S. Devi & Utami, 2021). Besaran belanja modal yang dapat diwujudkan dipengaruhi pula dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar kapasitas fiskal untuk berinvestasi lewat belanja modal guna mendorong pembangunan. Anggaran Biaya modal dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat daerah setempat terhadap sarana umum agar jalannya kehidupan terjamin aman, lancarnya pelayanan publik, dan tugas pemerintahan. Namun, jika anggaran belanja modal tidak memadai, hal itu dapat menghalangi efektivitas pembangunan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat menghambat penyediaan layanan publik secara optimal berhubung rendahnya belanja modal. Dalam konteks ini, belanja modal memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan publik.

Belanja modal pemerintah daerah dipengaruhi dari kapasitas fiskal yang dimiliki, melalui pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Alokasi biaya modal meningkat sejalan dengan penerimaan penapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Dalil et al., 2020 dalam (Yusuf &

Galuh, 2023). Pemerintah daerah diharapkan mampu memperbesar kapasitas fiskalnya untuk memenuhi kebutuhan fiskal dan mencegah terjadinya kesenjangan fiskal. Untuk menghadapi kesenjangan fiskal, diterapkan kebijakan desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar keuangan daerah diharapkan meningkat.

Desentralisasi fiskal yang menjadi implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengolah potensi sumber daya daerah tersebut dan dapat mengoptimalkan pembangunan daerahnya (Mekari Klikpajak Editorial, 2023). Salah satu bentuk upaya kapasitas daerah tersebut dengan meningkatnya kuantitas dari nilai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus melalui belanja modal. Partikel unggul pendapatan asli daerah pada penelitian ini, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi cerminan seberapa besar satu daerah tertentu dapat melaksanakan otonomi terhadap daerahnya sendiri dalam membiayai belanja pembangunan.

Sebagai sekilas pengetahuan, berikut disajikan tabel perkembangan kemandirian fiskal:

Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	DAU	DAK	Belanja Modal
Tahun 2019	11.951	114	3.784	6.974	2.099
Tahun 2020	11.139	93	3.438	7.333	996
Tahun 2021	11.718	91	3.432	7.395	1.447
Tahun 2022	13.484	115	3.435	3.384	1.713
Tahun 2023	13.976	139	3.558	3.700	1.794

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Prov. Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa besar realisasi selama lima (5) tahun, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2023. Di sisi lain, pada Dana Alokasi Umum tercapai di tahun 2019, Dana Alokasi Khusus di tahun 2021, dan Belanja Modal di tahun 2019. Secara bersamaan hampir seluruh pencapaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan terutama kinerja Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang besar alasannya karena adanya pandemi *Covid-19*.

Tabel 1. 2 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	DAK	DAK	Belanja Modal
Tahun 2019	3,86%	9,62%	3,61%	7,11%	24,87%
Tahun 2020	-6,79%	-18,42%	-9,14%	5,15%	-52,55%
Tahun 2021	5,20%	-2,15%	-0,17%	0,85%	45,28%
Tahun 2022	15,07%	26,37%	0,09%	-54,24%	18,38%
Tahun 2023	3,65%	20,87%	3,58%	9,34%	4,73%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tabel 1.2 dapat dianalisis jika selama 5 tahun antara pajak daerah dan retribusi daerah nilai pertumbuhan terbesar di tahun 2022. Sedangkan dana perimbangan, antara Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai penurunan di tahun 2022. Alasan besar atas menurunnya nilai penerimaan tersebut karena metode pencatatan Dana Alokasi Khusus non fisik Pendidikan (BOS) bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan adanya tugas Dana Alokasi Khusus fisik menyimpang dari *timeline*. Di sisi lain, belanja modal tertinggi di tahun 2021 karena belanja modal tidak mencapai target dalam sisa lelang dan pembelian tenda darurat untuk tempat isolasi mandiri demi penurunan pandemi *Covid-19* semester II tahun 2021.

Tabel 1. 3 Proporsi kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	DAU	DAK
Tahun 2019	173.755,97%	1.657,45%	69.684,30%	128.429,78%
Tahun 2020	81.182,82%	1.428,41%	29.262,07%	62.413,84%
Tahun 2021	115.385,82%	896,07%	41.833,91%	90.140,38%
Tahun 2022	142.019,75%	1.211,23%	75.341,29%	74.222,69%
Tahun 2023	147.383,87%	1.465,82%	77.099,31%	80.176,35%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tabel 1.3 dapat dianalisis jika perkembangan proporsi tabel diatas terhadap variabel dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif atau tidak stabil nilainya, dengan persentase terbesar jatuh pada pajak daerah tahun 2019 sebesar 173.755,97%. Maka, perlu optimalisasi melalui perbaikan layanan dan regulasi pemungutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah sumbangan yang wajib kepada negara yang dimiliki oleh individu atau badan, bersifat memaksa menurut hukum, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, retribusi daerah diperoleh dari pembayaran atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Dana alokasi umum menjadi bagian dari pendapatan APBN yang pengalokasiannya untuk pemerataan keuangan antardaerah dengan membiayai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2019, dana alokasi khusus merupakan perolehan anggaran yang sumbernya datang dari

pendapatan APBN dengan berkontributif terhadap pembiayaan dari kegiatan-kegiatan daerah. Menurut (Yusuf, 2023) juga mengungkapkan bahwa peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat akan berimplikasi pada peningkatan alokasi belanja modal yang digunakan oleh Pemerintah daerah. Mengacu pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai sumber dana utama dari pemerintah pusat, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kontribusi transfer dana dari pusat, berikut disajikan data mengenai perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah.

Dampak belanja modal sangat penting dalam optimalisasi pengelolaan anggaran daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 pasal 53 tertulis bahwa belanja modal menjadi biaya dalam bentuk beli, pengadaan, atau membangun aset tetap seperti tanah, mesin, gedung, infrastruktur, dan irigasi. Sebagai inti dari penelitian ini, belanja modal berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan belanja modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pengeluaran untuk belanja modal sering kali menemui berbagai kendala, seperti terbatasnya anggaran, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta minimnya realisasi serapan anggaran karena masalah administratif dan teknis. Tidak jarang, sebagian besar anggaran daerah justru terserap untuk belanja pegawai dan belanja operasional, sehingga porsi belanja

modal menjadi relatif kecil. Sebenarnya, pengeluaran biaya modal yang efektif menjadi hal yang utama juga untuk menghasilkan efek multiplier pada ekonomi daerah, baik melalui terbukanya lapangan kerja, peningkatan produktivitas, maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan pendapatan dengan biaya modal merupakan hal utama agar dapat memahami besarnya kontribusi dan memberikan gambaran sejauh mana penerapannya mendukung kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dalam bentuk efisiensi kebijakan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengatur strategi keuangan yang lebih optimal, menyempurnakan anggaran yang lebih efisien, dan tentunya penggunaan alokasi biaya modal memberi jaminan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang nilai tingkat kemajuan infrastrukturnya terus meningkat serta berperan besar atas perekonomian nasional. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, hingga pariwisata, Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan pembangunan di seluruh daerahnya. Sebagai dukungan pembangunan, pemerintah daerah mengandalkan dari PAD atau bahkan dari pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dari pendapatan. Efektif pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek utama dalam optimalisasi kualitas infrastruktur dan kesejahteraan. Kajian ini membagikan paparan tentang efektivitas pengelolaan dari anggaran daerah, serta berperan juga

untuk bahan evaluasi bagi pemerintah dalam perumusan strategi fiskal lebih efisien dari sebelumnya.

Studi ini memberi *highlight* analisis data dari tahun 2019 hingga 2023 sekaligus untuk mengamati tren dan pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. Periode kali ini dipilih karena terdapat pula perubahan fiskal daerah dalam masa perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta peningkatan dalam membangun infrastruktur dan layanan publik.

Penelitian periode tersebut dapat menggambarkan bagaimana sumber-sumber pendapatan daerah berkontribusi terhadap belanja modal serta bagaimana efektivitas kebijakan anggaran dalam mendukung pembangunan wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pemerintah daerah sebagai perspektif masyarakat Jawa Tengah. Dengan menganalisis pola penerimaan pajak daerah serta aliran dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa merancang strategi yang lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran, sehingga pengeluaran modal dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan serta memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien dan transparan.

Mengingat signifikansi aspek-aspek yang tertera sebelumnya, penelitian kali ini memiliki maksud agar dapat dianalisis secara menyeluruh dampak penerimaan

pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023. Melalui pendekatan ini, peneliti memiliki intensi agar dapat menginformasikan terhadap peningkatan pada strategi keuangan daerah yang lebih efisien dari sebelumnya serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, hingga dapat dibuat rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

1.3 Tujuan dan kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, hingga dapat dibuat tujuan penelitian yang akan diteliti:

1. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

2. Menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Terdapat pula manfaat yang didapat atas dasar rumusan masalah yang telah disampaikan yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui judul skripsi tersebut peneliti berharap pernyataan, bukti, hasil, dan proses tersebut dapat diterima dengan jelas khususnya terkait penerimaan belanja modal Provinsi Jawa Tengah. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa yang menerapkan pembelajaran selama kuliah, peneliti berharap penelitian ini dapat memahami latar belakang, isu, dan proses penyelesaian mengenai dampak peningkatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Dengan judul tersebut peneliti berharap akan terus menambah wawasan lebih luas dan terus belajar.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai salah bukti kompetensi mahasiswa, referensi pengembangan dan kemampuan akademik, evaluasi pemahaman, dan salah satu syarat kelulusan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada sistem akademik Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

c. Bagi Peneliti kedepannya

Hasil penjabaran tersebut dapat sebagai salah satu wawasan maupun acuan peneliti kedepannya dalam penemuan judul, pengerjaan, maupun penyelesaian hasil. Peneliti berharap dapat memberikan informasi secara jelas, mudah, dan tepat bagi pembaca, khususnya bagi yang tertarik mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai sistem penulisan yang mudah untuk diimplementasikan, berikut adalah susunan sistematika pada penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian tersebut menjadi permulaan yang terdapat pernyataan penjelas bagian latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tersebut menjadi penjelasan lanjutan dari bab sebelumnya, didalamnya terdapat pernyataan penjelas bagian landasan teori, penelitian terdahulu, penjelasan

mengenai kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian tersebut akan menjelaskan perihal variabel – variabel penelitian dan penjelasan operasionalnya, populasi maupun sampel yang diambil, jenis maupun sumber data penelitian dengan metode saat mengumpulkan data, begitu pula metode saat menganalisis data bagi penelitian nantinya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian tersebut akan menjelaskan tentang uraian dan deskripsi dari objek penelitian yang telah diteliti, dianalisis, dan dipaparkan setelah proses olah data yang kemudian akan diinterpretasikan dan diargumentasi terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bagian tersebut menjadi bab akhir skripsi yang akan menjelaskan tentang uraian hasil dan kesimpulan dari inti-inti pada bab sebelumnya yang kemudian dijelaskan kembali hasil tersebut secara ringkas, jelas, dan padat, serta tertulis saran dan keterbatasan selama proses penelitian.